



Media Title	Koran Tempo	
Date	9 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	25	Article Size
Journalist	Juli Hantoro	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

DATA MEGAPROYEK 6 RUAS TOL DALAM KOTA
Rencana Trase Tol

Pembebasan lahan ditargetkan selesai 2015 dengan dana Rp 5,4 triliun dari APBD.

Pembangunan tol dimulai pada Juli 2015 dan rampung pada 2018.

Konstruksi tol dikerjakan PT Jakarta Tollroad Development.

Anggota konsorsium PT JTD adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (PT Jakarta Propertindo, PT Jaya Konstruksi, PT Jaya Land, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Pembangunan Jaya, dan PT Jaya Real Property) dengan kepemilikan saham 78 persen.

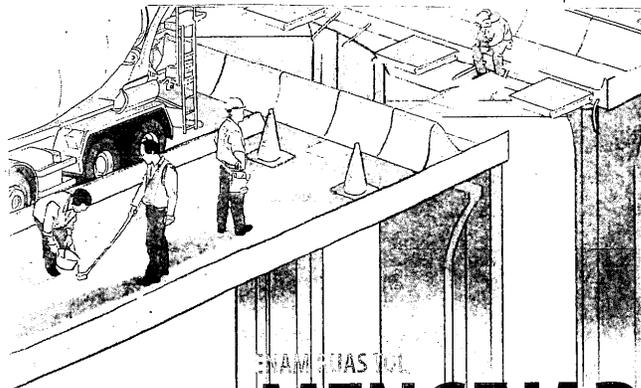
Sebanyak 22 persen saham PT Jakarta Tollroad Development dimiliki bersama oleh BUMN Konstruksi (PT Wijaya Karya Tbk, PT PP, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Hutama Karya) serta perusahaan konstruksi swasta, PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Biaya investasi untuk konstruksi sebesar Rp 41,174 triliun, dengan komposisi 30 persen modal sendiri + 70 persen pinjaman konsorsium perbankan.

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DKI JAKARTA
Data per Agustus 2014
Total: 9.607.958

- Kendaraan penumpang: 2.286.157
- Bus: 294.472
- Kendaraan barang: 501.513
- Sepeda motor: 6.525.816
- Kendaraan khusus: 78.805

SUMBER: WAWANCARA / PERDA DKI JAKARTA NO. 1 TAHUN 2012 / DEWAN RISET DAERAH DKI JAKARTA / DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA | PRAGA UTAMA



Juli Hantoro
juli@tempo.co.id

MENGEJAR TARGET SEBELUM SUKAN

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menerima secara estafet bendera penyelenggaraan Asian Games XVIII di Kota Incheon Korea Selatan, pekan lalu. Basuki, yang akan menggantikan posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI, kini mengejar target pembangunan infrastruktur untuk menunjang perhelatan sukan negara-negara Asia yang bakal digelar di Jakarta pada 2018 itu.

Salah satu hal yang disorot adalah infrastruktur tol dalam kota. Rencana pembangunan enam ruas tol, yang awalnya dibangun dalam tiga tahap dan selesai pada 2022, diminta Ahok—panggilan akrab Basuki—agar selesai pada 2018. Ahok berharap pengerjaan enam ruas tol itu dilakukan serentak. "Saya ingin proyek ini selesai sebelum masa jabatan saya berakhir dan siap sebelum Asian Games," kata dia beberapa waktu lalu.

Keinginan Ahok itu bisa saja dipenuhi. Menurut Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development (JTD), Frans Satyaki Sunito, jika pembebasan lahan bisa selesai sesuai dengan target yang dicanangkan, tahapan konstruksi bisa langsung dimulai dan dikerjakan sekaligus.

"Lancar-tidaknya penyediaan lahan itu bergantung pada komitmen pemerintah Jakarta sendiri," ujar Frans, saat perjanjian proyek

"Lancar-tidaknya penyediaan lahan itu bergantung pada komitmen pemerintah Jakarta sendiri."

ini disahkan di Kementerian PU, Juli lalu.

Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 41,174 triliun. Dana itu bersumber dari pendanaan PT JTD sendiri, dengan porsi sebesar 30 persen. Adapun 70 persen sisanya berasal dari konsorsium bank. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengeluarkan dana Rp 5,4 triliun dari kas daerah untuk pembebasan lahan.

Pembebasan rencananya dilakukan pada akhir tahun ini dan bisa selesai pada pertengahan 2015. PT JTD memproyeksikan pembangunan tol tahap pertama, yakni ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang, bisa dimulai pada Juli 2015.

Dua ruas itu diprioritaskan karena dianggap akan berkontri-

busi besar terhadap lalu lintas di wilayah itu. Kemudian, wilayah Jakarta Timur akan terhubung langsung dengan wilayah Jakarta Barat. Tahap pembangunan berikutnya meliputi trase Duri Pulo-Kampung Melayu, Kampung Melayu-Kemayoran, Ulujami-Tanah Abang, serta Pasar Minggu-Casablanca.

Frans mengatakan, terlepas dari keinginan Ahok mempercepat pelaksanaan proyek, PT JTD hingga saat ini masih berpegang pada rencana dan jadwal semula, yakni pembangunan per tahap yang akan selesai pada 2022.

Proyek enam ruas tol ini sebenarnya telah digagas sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030, tertera poin

kewajiban pemerintah DKI untuk mengembangkan jaringan jalan arteri demi meningkatkan luas jalan, menambah aksesibilitas, dan mengurangi kemacetan.

Konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan enam ruas tol baru yang menghubungkan setiap penjurur Jakarta, dari timur ke barat dan dari selatan ke utara. Penolakan bermunculan. Para aktivis menilai pembangunan ruas tol ini hanya akan menambah jumlah mobil yang berseliweran di Ibu Kota.

Petisi penolakan pun diunggah di situs *Change.org*. Hingga kemarin, 4.206 orang telah menandatangani petisi tersebut. "Studi kelayakan pembangunan tol dalam Kota Jakarta menyebut setiap penambahan 1 kilometer jalan akan meningkatkan jumlah kendaraan sebanyak 1.923 'unit mobil,'" kata Cak Daus, penggagas petisi itu.

Frans Satyaki mengakui bahwa pembangunan enam ruas tol sebetulnya tak terlalu signifikan menambah rasio jalan di Jakarta. "Panjang total tol ini hanya 70 kilometer. Paling penambahan rasio jalannya hanya sekitar 0,3 persen," kata dia kepada Anggrita Desyani dari *Tempo* pada September lalu.

Frans menjamin nantinya tol baru ini akan terintegrasi dengan sistem bus ulang-alik atau *bus rapid transit* (BRT) yang menghubungkan setiap ujung tol. Pengelola tol menawarkan konsep *bus bay*, atau ruang khusus perhentian bus. "Sehingga aktivitas bus tidak mengganggu lalu lintas." Ada 18 halte *bus bay* yang akan dibangun.

PRAGA UTAMA